

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam sumber daya alam dan potensinya. Indonesia memiliki lebih dari 13.466 pulau besar dan kecil, memiliki panjang garis pantai sekitar 99.093 km dan merupakan negara dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada dan Rusia (Agung dalam Suharti, 2016:74). Sebagian daerah pantai di Indonesia memiliki potensi berupa sumber daya alam dengan berbagai macam tipologi habitat serta keaneragaman biota yang tinggi. Selain itu, daerah pantai tersebut sangat strategis untuk pengembangan pariwisata. Salah satu sumber daya alam daerah pantai adalah kawasan mangrove.

Menurut Nybakken dalam Agussalim & Hartoni (2014:148), kawasan mangrove merupakan varietas pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove, dan memiliki fungsi ekologis penting antara lain sebagai tempat pemijahan, pengasuhan dan mencari makan bagi biota tertentu, serta berperan sebagai penahan abrasi. Sehingga hutan mangrove merupakan ekosistem dengan tingkat produktivitas yang tinggi dengan berbagai macam fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang penting. Salah satu fungsi sosial mangrove adalah memungkinkannya dilakukan pengembangan pariwisata alam.

Dalam perkembangannya, tren pariwisata telah berkembang kepada kegiatan wisata yang memiliki kecenderungan kembali ke alam yang didasari adanya kecenderungan wisatawan kembali ke alam (Tim Pengembangan Nasional di Kawasan Hutan, 2003). Salah satu bentuk kemasan pariwisata alam adalah ekowisata. Pemanfaatan ekosistem mangrove untuk ekowisata sejalan dengan pergeseran minat wisatawan dari old tourism yaitu wisatawan yang hanya datang melakukan wisata saja tanpa ada unsur pendidikan dan konservasi menjadi new tourism yaitu wisatawan yang datang untuk melakukan wisata ada unsur pendidikan dan konservasi di dalamnya (Agussalim & Hartoni, 2014:148). Menurut Kementerian Pariwisata (2015), Ekowisata menjadi alternatif untuk mengkonservasi lingkungan suatu kawasan dan pemberdayaan masyarakat. Ekowisata diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan wisata ramah lingkungan yang mendukung konservasi alam.

Kabupaten Bekasi yang terletak di wilayah administratif Provinsi Jawa Barat hingga saat ini dikenal sebagai kota industri. Selain memiliki kawasan industri terbesar se-Indonesia, Kabupaten Bekasi juga memiliki potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk menunjang program otonomi daerah di bidang pariwisata. Salah satu sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Bekasi adalah kawasan mangrove. Kabupaten Bekasi memiliki kawasan mangrove terluas ketiga di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Indramayu dengan luas mencapai 10.481,15 Hektar (BPS Jawa Barat, 2016).

Kawasan Mangrove yang terdapat di Kabupaten Bekasi salah satunya terletak di Kecamatan Muara Gembong dan telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029. Pada pasal 76, arahan zonasi untuk kawasan mangrove tersebut ditetapkan dengan memperhatikan: pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan wisata alam; ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu mangrove dan vegetasi pantai; ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove dan vegetasi pantai; ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi ekosistem mangrove, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangan biota laut.

Kawasan mangrove di Kabupaten Bekasi mengalami penyusutan setiap tahunnya. Menurut Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan (DPPK) Kabupaten Bekasi, adanya penyusutan luas hutan bakau (mangrove) di Kecamatan Muara Gembong dan Tarumajaya sejak 1997. Penyusutan hutan bakau di kedua kecamatan itu mencapai 1.000 hektare setiap tahunnya di masing-masing wilayah. Salah satu penyebab terjadinya hal ini adalah penebangan liar oleh masyarakat sekitar kawasan mangrove di Kabupaten Bekasi (www.liputan6.com, Oktober 2016). Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Atie Ernawati pada 2016, pada Kecamatan Muara Gembong khususnya Pantai Muara Beting terdapat beberapa jenis tanaman mangrove seperti *Rhizophora Stylosa Griff* (bakau merah), *Xylocarpus moluccensis*, *Avicenna* (pohon api-api). Namun, sebagian dari tanaman ini mengalami kerusakan dan menyebabkan sebagian besar wilayah pantai mengalami abrasi, sehingga luas daratan dan pantai berkurang. Salah satu faktor yang menyebabkan berkurangnya kawasan mangrove di Pantai Muara Beting

adalah meningkatnya jumlah penduduk, sehingga kebutuhan akan pemukiman untuk tempat tinggal meningkat pula.

Menurut Wakil Ketua Pokdarwis Aliansi Pemuda Bahagia Tangguh (Alipbata) adanya penyusutan hutan mangrove seluas 10 sampai 20 meter setiap tahun, bahkan sejak 1980 sampai 2015 hutan mangrove di Pantai Muara Beting telah kehilangan tiga kilometer. Penyusutan hutan mangrove tersebut berdampak pada berkurangnya sumber makanan lutung jawa yang ada di Pantai Muara Beting. Sehingga terkadang hewan dilindungi tersebut berkelahi berebut makanan (www.republika.co.id, Desember 2019).

Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi mencanangkan pengembangan pariwisata prioritas yaitu ekowisata mangrove di Kecamatan Muara Gembong pada tahun 2019. Ekowisata mangrove Muara Gembong meliputi pengembangan di daya tarik wisata Pantai Muara Beting, Muara Bendera dan Pantai Bahagia. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Sutia Resmulyawan yang dilansir oleh antaranews.com pada februari 2019, sasaran pengembangan wisata di Muara Gembong diarahkan untuk pengembangan ekowisata berbasis sumber daya mangrove. (www.megapolitan.antaranews.com, Februari 2019)

Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi mencanangkan pengembangan ekowisata mangrove di Pantai Muara Beting dilakukan dengan diversifikasi produk pengembangan kegiatan petualangan dan rekreasi alam. Wisatawan yang berkunjung dapat melihat secara langsung kehidupan dan aktivitas masyarakat di sekitar Muara Beting seperti kegiatan budidaya ikan dan tambak udang. Selain itu Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi juga mengatakan bahwa Pantai Muara Beting

memiliki potensi wisata yang dapat dijadikan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bekasi, bahkan Jawa Barat. Pernyataan ini didorong oleh adanya beberapa satwa yang dilindungi seperti Lutung Jawa dan Elang Bondol yang menempati kawasan hutan mangrove di Pantai Muara Beting. Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja juga berpendapat bahwa pariwisata merupakan sektor penting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah (www.arahdestinasi.com, Februari 2019).

Pantai Muara Beting belum memperlihatkan hasil signifikan dari pengembangan ekowisatanya seperti yang sudah dicanangkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi pada tahun 2019. Kondisi fasilitas di Pantai Muara Beting sebagai sarana pendukung kegiatan ekowisata masih sangat minim, begitu juga dengan akses menuju lokasi yang belum memadai. Sementara itu, Ketua Pokdarwis Alipbata mengatakan masyarakat hingga saat ini masih ragu untuk mengambil tindakan dalam pengembangan ekowisata. Hal ini dikarenakan belum terkoordinasinya komunikasi antar masing-masing *stakeholder* yang memiliki kewajiban untuk menjalankan pengembangan ekowisata di Pantai Muara Beting. Seperti yang dikatakan oleh Bjork dalam Wondirad, et al. (2019:1) bahwa ekowisata sendiri merupakan aktivitas dimana pemerintah, industri pariwisata, wisatawan dan masyarakat saling bekerja sama dalam menciptakan kemungkinan bagi wisatawan untuk berkunjung ke daerah alami dalam rangka mengagumi, melakukan studi, dan menikmati alam dan budaya. Kegiatan ini dilakukan dengan tidak mengeksploitasi sumber daya tetapi berkontribusi untuk mendukung pengembangan berkelanjutan. Dalam melaksanakan konsep pengembangan

ekowisata mangrove di Pantai Muara Beting, tentunya diperlukan partisipasi yang cukup baik dari para *stakeholder* yang terlibat. Hubungan antar *stakeholder*, kolaborasi dan kerjasama dalam pengembangan ekowisata mangrove di Pantai Muara Beting merupakan suatu hal yang penting.

Stakeholder menurut Hetifah (2003:3) dimaknai sebagai individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (secara positif maupun negatif) oleh kegiatan atau program pembangunan. Menurut Scott (2008) dalam Pamungkas (2013:49) Hubungan antar organisasi, kolaborasi dan kerjasama dalam pengelolaan ekowisata merupakan suatu hal yang penting. Dalam pelaksanaan konsep pengembangan ekowisata, *stakeholder* harus mampu mengetahui bagaimana peran dalam menjalankan pengembangan ekowisata di Pantai Muara Beting. Selain itu juga, peran aktif dari masing-masing *stakeholder* juga sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan pengembangan ekowisata di Pantai Muara Beting.

Peran *stakeholder* dalam pengembangan ekowisata Pantai Muara Beting merujuk pada Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bahwa untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran business, government, community, academic, and media (Aribowo, 2018:33).

Government dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi telah menandatangani MoU dengan Perhutani Bogor dalam rencana pengembangan wisata mangrove di Kecamatan Muara Gembong. Menurut Administratur KPH Bogor, Jerry Purwo Nugroho, MoU ini diharapkan dapat menjadikan wisata mangrove di Muara Gembong lebih maju dan lebih terkenal. Selain itu, dengan adanya MoU antara Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi dengan Perhutani Bogor dapat bermanfaat bagi masyarakat Muara Gembong. Encep S Jaya sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi juga menyampaikan bahwa mangrove merupakan hutan yang menarik dan potensial untuk dikembangkan wisata, hal ini didorong oleh dana-dana CSR yang diperoleh untuk mengembangkan wisata mangrove di Muara Gembong. Sektor bisnis pada Pantai Muara Beting berupa usaha masyarakat lokal seperti pengolahan tanaman mangrove dan penyediaan akomodasi wisata berupa perahu. Selain itu juga, Dinas Pariwisata saat ini tengah mengajak investor lain untuk masuk ke dalam pengembangan wisata mangrove di Muara Gembong.

Selain government dan business, community dalam hal ini masyarakat dan organisasi non-government yang terlibat dalam pengembangan wisata mangrove di Muara Beting adalah Pokdarwis Alipbata (Aliansi Pemuda Bahagia Tangguh). Pokdarwis Alipbata yang berkedudukan di Desa Bahagia memiliki fungsi sebagai fasilitator bagi wisatawan dalam kegiatan konservasi seperti menanam mangrove. Selanjutnya media yaitu sarana yang mempublikasikan atau menyiarkan informasi mengenai daya tarik, keunikan, dan isu yang ada di Pantai Muara Beting sebagian besar dilakukan melalui website dan media sosial. Media ini diantaranya siipuljalanjalan.com dan @alipbata_muaragembong pada media sosial Instagram

yang dikelola oleh Pokdarwis Alipbata. Dalam tahap pengembangan pariwisata, diperlukan adanya kajian dan penelitian mendalam pada suatu destinasi. Kajian dan Penelitian mengenai wisata mangrove di Muara Gembong salah satunya dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB). Namun, untuk Muara Beting sendiri, belum adanya kajian mengenai pariwisata. Penelitian yang telah dilakukan di Pantai Muara Beting sebagian besar mengenai jenis tanaman mangrove dan satwanya.

Melihat dari pihak-pihak yang telah terlibat pada pengembangan wisata mangrove di Muara Gembong, model *stakeholder* yang cocok untuk digunakan sebagai konsep dalam melihat perannya adalah Model Pentahelix. Model Pentahelix mencakup akademisi, swasta, pemerintah, masyarakat dan media yang mana konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya yang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Sehingga, penelitian ini akan mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dan sejauh mana peran dari masing-masing *stakeholder* dilihat dari model pentahelix dalam upaya pengembangan ekowisata mangrove di Pantai Muara Beting. Maka dari itu, judul penelitian ini adalah “Peran *Stakeholder* dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove di Pantai Muara Beting”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui siapa saja *stakeholder* yang terlibat dan sejauh mana peranan *stakeholder* dalam pengembangan ekowisata mangrove di Pantai Muara Beting dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan ekowisata mangrove di Pantai Muara Beting bila ditinjau menggunakan model pentahelix?
2. Bagaimana pengaruh *stakeholder* dalam pengembangan ekowisata mangrove di Pantai Muara Beting?
3. Bagaimana kepentingan *stakeholder* dalam pengembangan ekowisata mangrove di Pantai Muara Beting?

C. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini mencakup:

1. Tujuan Formal

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Strata I Program Studi Studi Destinasi Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.

2. Tujuan Operasional

Tujuan dari adanya penelitian *stakeholder* dalam pengembangan ekowisata mangrove di Pantai Muara Beting berdasarkan pada permasalahan yang ada yaitu mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dan mendeskripsikan hal-hal apa saja yang dilakukan masing-masing *stakeholder* dalam pengembangan ekowisata mangrove di Pantai Muara Beting, serta menggambarkan kondisi masing-masing peran *stakeholder* berdasarkan matriks pengaruh dan kepentingan.

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam memperoleh data penelitian peran *stakeholder* dalam pengembangan ekowisata mangrove di Pantai Muara Beting, kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan mobilitas peneliti di lapangan. Hal ini disebabkan oleh pandemic Covid-19 yang terjadi di Indonesia mewajibkan seluruh masyarakat untuk membatasi perjalanan di luar rumah. Selain itu, daya tarik wisata yang ditutup sementara mengharuskan peneliti untuk memperoleh data via telepon, karena fasilitas di Pantai Muara Beting yang belum memadai, keterbatasan sinyal juga menjadi hambatan peneliti dan narasumber dalam melakukan penelitian.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini mencakup:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi *stakeholder* mengenai sejauh mana perannya dalam pengembangan ekowisata mangrove di Pantai Muara Beting. Selain itu, penelitian ini sebagai acuan dalam memecahkan masalah mengenai *stakeholder* yang memiliki peran dalam pengembangan ekowisata mangrove di Pantai Muara Beting

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam bidang kepariwisataan, terutama dalam ekowisata mangrove. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana peranan *stakeholder* dalam pengembangan ekowisata mangrove di Pantai Muara Beting.